

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik simpulan:

1. Ketidakpastian hukum di bidang penanaman modal terjadi karena belum tertatanya polarisasi pembagian kewenangan perizinan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini spirit otonomi daerah disatu sisi belum terlaksana dengan baik sehigga daerah belum mampu mengelolah potensi yang ada di wilayah administrasinya mengingat masih ada intervensi yang cukup besar oleh pemerintah pusat dan propinsi dalam menangani urusan perizinan di wilayah kabupaten/kota.
2. Penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ende merupakan suatu langkah tepat dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi dalam pengurusan izin terkhususnya pada bidang penanaman modal sehingga memperpendek alur proses perizinan. Dalam prakteknya penerapan tersebut belum berjalan dengan cukup signifikan oleh karena adanya beberapa persoalan baik internal maupun eksternal di antaranya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai, kurangnya anggaran dan belum tertatanya daya promosi yang promotif dan berdaya saing yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat dalam mengurus izin usaha

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan standar pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Ende baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga lebih memadai dan berkompeten dalam merespon kebijakan perizinan yang murah, cepat dan sederhana sesuai dengan perkembangan dinamika kemasyarakatan serta tuntutan regulasi
2. Diperlukan suatu keteraturan baik berupa kebijakan ataupun bentuk aturan tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang baik itu eksekutif ataupun legislative dalam menciptakan kepastian hukum terkait pendelegasian kewenangan di bidang perizinan kepada pemerintah daerah serta peningkatan anggaran untuk pembiayaan kelangsungan proses investasi di daerah
3. Perlu adanya antusias dari masyarakat baik itu secara perorangan atau kelompok untuk terlibat aktif dalam kegiatan penanaman modal baik sebagai pelaku usaha ataupun organ penting yang memberikan masukan terkait kinerja dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2002 *penelitian hukum dalam praktek*, penerbit: rineka cipta. Jakarta
- Bob Widayahartono. 2006. *Gagasan Ekonomi Kawasan Khusus (KEK)*, penerbit sinar harapan, jakarta
- Fahmi Wibawa, 2007 *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, penerbit: PT. Grasindo, Jakarta
- Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta; penerbit Kanisius
- Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Gitman, joehnk.2005. *Principle of managerial finanche 11th* edition.United Stated.Pearson Education, Inc.
- Hanly Fendy Djohar Siwu, 2014, *Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, penerbitt Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Hartini, Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Hendrik Budi Untung, , 2010, *Hukum Investasi*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Ida Bagus Rahmadi Supanca, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, penerbit Ghalia Indonesia, Bogor

- Jasim Hamidi.2011.*Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*.Jakarta: penerbit prestasi pustaka
- Josef Mario Monteiro.2016.*Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Kansil. C.S.T. 1986 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, penerbit Balai Pustaka. Jakarta
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, penerbit Rajawali Press, . Jakarta
- Lon L. Fuller, 1969, *The Morality of law*, penerbit Yale Unversity Press, New heaven
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, penerbit: Raja Grafindi Persada, Jakarta:
- Padmo Wadjono, 1986, *Indonesia negara berdasarkan atas hukum*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014 *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, penerbit Kencana, Jakarta
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, penerbit Raja Grafindo Persaja, Jakarta
- S.H.Surandajang. 2010 *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, penerbit pustaka sinar harapan, Jakarta
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soedjadi, F.X. 1997. *Analisis Manajemen Modern Kerangka Berpikir dan Beberapa Aplikasinya*. Penerbit: PT. Toko Gunung Agung. Jakarta

Sunariyah, 2004, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN

Suradiyanto, 2015, *Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia*, penerbit Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Tulus Tambunan. 2006. *Iklm Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi*

Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah.*, penerbit Fokusmedia, Bandung

Yanto Bashri (ed), 2003 , *“Mau kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia. Prisma pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti”*, penerbit Prenada Media, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 tahun 2016 tentang Penanaman Modal

Peraturan Bupati Kabupaten Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende

Sumber Lainnya

(<https://www.viva.co.id/arsip/1234251-ternyata-lima-hal-ini-jadi-kendala-investasi-di-indonesia>)

(<http://www.kompasiana.com/kedamaianhati/kewenangan-perizinan-penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-provinsi-kabupaten-dan-kota>)

